

# **SKRIPSI**

**NUR IDA TUALEKA**

## **PERLINDUNGAN HAK ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM ISLAM DAN BW**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**

**PERLINDUNGAN HAK ANAK LUAR KAWIN  
MENURUT HUKUM ISLAM DAN BW**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**



**Liliek Kamilah, SH., M.Hum.**

**NIP : 130531799**

**Penyusun,**



**Nur Ida Tualeka**

**NIM : 030025161**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan  
Panitia Penguji Pada hari Jum'at, tanggal 9 Juli 2003**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : DR. Afdol S.H., MS  
NIP. 130517143**

**Anggota : 1. Liliek Kamilah, S.H., M.Hum  
NIP. 130531799**

**2. Drs. Abdoel Shomad, S.H., M.H  
NIP. 131999627**

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dan menganalisis permasalahan mengenai perlindungan hak anak luar kawin menurut Hukum Islam dan BW, berikut ini penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Anak luar kawin adalah anak tidak sah, yang di lahirkan di luar perkawinan yang sah. Menurut hukum islam anak luar kawin dapat disahkan dengan cara perkawinan kedua orang tuanya, sedangkan menurut BW anak luar kawin dapat disahkan dengan cara pengakuan dan pengesahan dari kedua orang tuanya. Pengesahan ini berupa perkawinan kedua orang tuanya dan surat pengesahan dari kepala Negara dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Surat pengesahan dari kepala Negara diberikan apabila orang tua dari anak luar kawin tidak melakukan perkawinan tetapi dengan cara mengakuinya saja.
2. Menurut hukum islam anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja sehingga, tanpa pengakuan dari ibunya, anak tersebut dengan sendirinya mempunyai hubungan atau nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang hukum perdata atau BW tanpa pengakuan dari kedua orang tuanya anak tersebut tidak dapat dihubungkan dengan siapa-siapa.



3. Anak luar kawin sering di sebut sebagai anak pembawa sial dan aib di dalam masyarakat sehingga anak tersebut dikucilkan dan di perlakuan tidak adil dalam masyarakat. Namun ada sebahagian masyarakat yang menerima kehadiran anak luar kawin dengan kesadaran, bahwa mereka adalah anak-anak tak berdosa yang dicampakan oleh orang tuanya untuk itu anak-anak yang demikian haruslah dilindungi, sebab mereka memiliki hak asai untuk hidup baik masih di dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan tanpa ada yang menghalangi.
4. Perlakuan salah terhadap anak luar kawin, erat kaitannya dengan penelantaran terhadap anak, oleh karena itu hukum Islam dan BW memberikan perlindungan kepada mereka agar mereka dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana yang dimiliki oleh anak-anak sah. Dari semua kategori anak, baik itu anak sah maupun anak tidak sah, undang-undang No.4.tahun 1979 tentang perlindungan kesejahteraan anak, menghendaki agar mereka dilindungi karena mereka merupakan penerus cita-cita bangsa dan negara.

## **B. Saran**

Selain beberapa kesimpulan di atas, berikut ini penulis akan memberikan beberapa saran yang sekiranya ada manfaatnya.

1. Hendaknya orang tua, pemerintah dan masyarakat berusaha mengurangi lahirnya anak luar kawin dengan berbagai cara rasional terutama dengan

membendung penyebab lahirnya anak luar kawin dengan cara hendaknya orang tua memberikan perhatian kepada anak-anaknya dengan menanamkan ajaran agama pada mereka sehingga mereka memiliki akhlak yang baik dalam pergaulan, dan hendaknya orang tua sejak dini memberikan pengetahuan atau pendidikan seks kepada anak-anak mereka agar supaya anak-anak dapat mengetahui bahaya-bahaya dari seks tersebut yang dapat menimbulkan masalah sosial dalam masyarakat seperti AIDS atau HIV, hamil di luar nikah yang melahirkan anak-anak tidak sah atau anak luar kawin. Pemerintah juga berkewajiban untuk mencegah masalah tersebut dengan cara pemerintah lebih tegas dalam mengontrol pornografi di berbagai publik.

2. Jika anak luar kawin itu terlanjur lahir maka hendaknya para orang tua, masyarakat, pemerintah berusaha melindunginya agar jangan menjadi korban perbuatan keliru yaitu dengan cara menggalang program pengangkatan anak dan orang tua asuh.